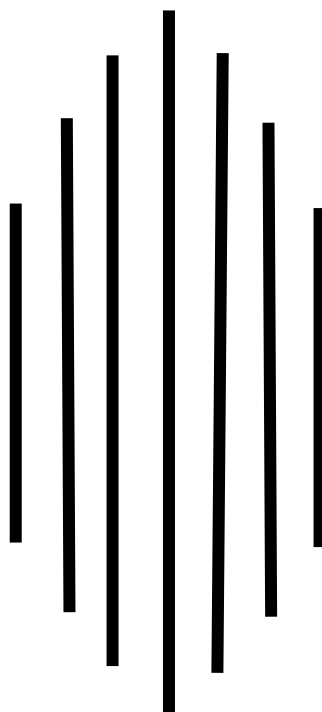




RENCANA KERJA



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2026**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana dan RKPD Semesta Berencana.

- (3) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026; dan
 - b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- p. Dinas Kebudayaan;
- q. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- y. Dinas Ketenagakerjaan;
- z. Dinas Pertanian;
- aa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- bb. Kecamatan Nusa Penida;
- cc. Kecamatan Dawan;
- dd. Kecamatan Banjarangkan; dan
- ee. Kecamatan Klungkung.

- (2) Renja Sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renja Inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Semesta Berencana Tahun 2026 dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja Dinas Kesehatan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (16) Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja Dinas Kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2026 untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja Dinas Perhubungan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja Dinas Pariwisata Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja Dinas Ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja Dinas Pertanian Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja Kecamatan Nusa Penida Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (30) Renja Kecamatan Dawan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja Kecamatan Banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja Kecamatan Klungkung Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026

Rencana Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Klungkung
Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja OPD juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program - program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja OPD ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya - sumber daya organisasi secara efektif.

Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja OPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam forum Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja OPD dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up planing*, *top down planning* dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan pentahapan yaitu persiapan penyusunan Rencana Kerja OPD, penyusunan rancangan awal Rencana Kerja OPD, penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dan penetapan Rencana Kerja OPD. Tahapan penyusunan rancangan merupakan tahapan penyempurnaan Rancangan Awal Renja berdasarkan SE Bupati Klungkung Nomor 0007.2.4/70/Bappeda/2/2025 tanggal 14 Pebruari 2025 tentang penyempurnaan

rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2026 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi rancangan dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tahun 2026 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2026 dimana RKPD Kabupaten Klungkung tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029. Rencana Kerja OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029.

Rencana Kerja OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM Kabupaten Klungkung tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tahun 2026 dengan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 361);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
27. Keputusan Kepala BKN Nomor 13/Kep/2002 Tanggal 12 Pebruari 2002 Tentang ketentuan Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : (3,43 / 2025);
33. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
34. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM di bidang Kepegawaian selama tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra BKPSDM dan RKPD.

Berdasarkan maksud penyusunan Renja tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a). Menjadi pedoman penyusunan RKA BKPSDM Tahun 2026;
- b). Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di BKPSDM Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BKPSDM Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja BKPSDM Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Kebijakan Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini, diuraikan Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan, Rencana Program dan Kegiatan, serta Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Klungkung Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Klungkung

Dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2024 dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kerja yang telah menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun 2024.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung pada Renja TA 2024 merancang pelaksanaan 3 program 10 kegiatan dan 21 subkegiatan yang meliputi dua bidang urusan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Bidang Urusan Kepegawaian dan Bidang Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pagu program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung dalam RKPD TA 2024 adalah sebesar Rp9.803.510.757,00 yaitu untuk bidang urusan Kepegawaian sebesar Rp7.295.216.457,00 dan bidang urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.508.294.300.

2.2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja kegiatan sebesar 76,82%, yaitu dari target 85 indeks, terealisasi 65,30 indeks.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Tingkat Disiplin Aparatur, capaian kinerja kegiatan mencapai 99,47% yaitu dari target 100% telah terealisasi sebanyak 99,47%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum, capaian kinerja kegiatan mencapai 94,44% yaitu dari target 100% telah terealisasi sebanyak 94,44%.
4. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator kinerja Persentase Jabatan yang Terisi dengan capaian kinerja 94,20% yaitu dari target 95% telah terealisasi sebanyak 89,49%.

2.2.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang Direncanakan

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu mencapai 100% yaitu dari target 5 laporan telah terealisasi sejumlah 5 laporan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, capaian kinerja kegiatan mencapai 100% yaitu dari target 100% telah terealisasi sebanyak 100%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase BMD yang dipelihara dalam Kondisi Baik, dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya mencapai 100%.
4. Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase Layanan Kepegawaian sesuai SOP dengan capaian kinerja program mencapai 100%, dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.

2.2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang Direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, capaian kinerja program mencapai 121,77% yaitu dari target sebesar 75 indeks dengan realisasi mencapai 91,33 indeks.
2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN dengan capaian kinerja 105,71% yaitu dari target 52% telah terealisasi sebanyak 54,97%.
3. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja Persentase ASN dengan Kinerja Baik dengan capaian kinerja 104,65% yaitu dari target 95 % telah terealisasi sebanyak 99,42%.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator yaitu Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi dengan capaian kinerjanya mencapai 116,99% dari target sebesar 75% dan realisasi mencapai 87,74%.
5. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan indikator Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi dengan capaian 105,26% dari target

95% dan mencapai realisasi 100%.

2.2.4 Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan

Dari hasil evaluasi Renja tahun 2024, secara spesifik, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada program maupun kegiatan, yaitu:

1. Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran dikarenakan terjadi penurunan pada semua komponen sakip, seperti komponen perencanaan pada tahun 2023 memperoleh nilai 21,60 sementara tahun 2024 memperoleh nilai 21,30; komponen pengukuran pada tahun 2023 memperoleh nilai 21,60 sementara tahun 2024 memperoleh nilai 21,30; komponen pelaporan pada tahun 2023 memperoleh nilai 10,80 sementara tahun 2024 memperoleh nilai 10,05; dan komponen evaluasi pada tahun 2023 memperoleh nilai 17,50 sementara tahun 2024 memperoleh nilai 16,25 sehingga hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan komponen sakip yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi selama tahun 2024 yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja hasil yang direncanakan.
2. Untuk kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Tingkat Disiplin Aparatur, tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran dikarenakan masih terdapat pegawai yang terlambat atau tidak melakukan absensi tepat waktu.
3. Untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum, tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran dikarenakan salah satu subkegiatan, yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai target, yaitu dari target awal sebanyak 5 paket, namun terealisasi hanya 4 paket, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran pada DPA Perubahan tahun 2024.
4. Untuk kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator kinerja Persentase Jabatan yang Terisi, tidak tercapainya target kinerja/keluaran dikarenakan pengisian jabatan merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

2.2.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra BKPSDM Kabupaten Klungkung

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak berdampak signifikan pada kinerja BKPSDM Kabupaten Klungkung.

2.2.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Diambil untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tersebut

Untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan atau tindakan yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan komponen SAKIP yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi sehingga diharapkan nilai tersebut mengalami peningkatan di tahun selanjutnya.
2. Meningkatkan disiplin dan profesionalitas aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung melalui upaya pembinaan kedisiplinan serta evaluasi secara berkala.
3. Melakukan perencanaan anggaran secara matang dan evaluasi terhadap perencanaan sebelumnya agar di tahun selanjutnya realisasi anggaran sesuai dengan anggaran yang direncanakan.
4. Melaksanakan perencanaan mutasi secara tepat waktu.

Tabel 2.1 (TC-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Klungkung dan Pencapaian Renstra
BKPSDM Kabupaten Klungkung s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2024						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1)/2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				39,217,084,4 25		7,599,422,92 9		10,447,521,2 67		8,601,072,84 8				14,498,240, 047		30,698,735, 824		
5.03	KEPEGAWAIAN				27,793,027,5 25		5,544,731,22 2		8,115,759,76 7		6,434,653,92 7				9,812,057,4 66		21,791,442, 615		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA (RENJA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	80.00	21,944,312,6 70	33.00	5,088,074,10 8	75.00	6,084,862,85 6	91.33	5,632,108,44 3	121.77	92.56	75.00	7,232,581,4 36	91.33	17,952,763, 987	114.16	81.81
5.03.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85.50	11,718,701	85.18	6,674,450	85.00	3,443,700	65.30	1,946,525	76.82	56.52	85.40	3,881,340	65.30	12,502,315	76.37	106.69
5.03.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah	Dokum en	27.00	8,261,429	9.00	3,724,500	9.00	2,495,800	9.00	1,285,650	100.00	51.51	8.00	2,745,340	26.00	7,755,490	96.30	93.88
5.03.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lapora n	86.00	3,457,272	31.00	2,949,950	29.00	947,900	29.00	660,875	100.00	69.72	29.00	1,136,000	89.00	4,746,825	103.49	137.30

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2024						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)/2025		Tingkat Capaian Realiasai Target Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5.03.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	Lapora n	15.00	20,660,308,9 40	4.00	4,795,579,45 8	5.00	5,688,171,84 7	5.00	5,368,398,41 9	100.00	94.38	5.00	6,425,217,2 14	14.00	16,589,195, 091	93.33	80.30
5.03.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/ bulan	40.00	20,643,758,9 40	13.00	4,795,579,45 8	40.00	5,683,171,84 7	40.00	5,368,158,41 9	100.00	94.46	40.00	6,419,717,4 14	93.00	16,583,455, 291	232.50	80.33
5.03.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Lapora n	39.00	16,550,000	13.00	-	13.00	5,000,000	13.00	240,000	100.00	4.80	13.00	5,499,800	39.00	5,739,800	100.00	34.68
5.03.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur	Persen	100.00	16,044,066	99.61	2,076,000	100.00	4,323,500	99.47	255,500	99.47	5.91	100.00	4,528,940	99.47	6,860,440	99.47	42.76
5.03.01 .2.05.0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administra si	Dokum en	6.00	16,044,066	24.00	2,076,000	2.00	4,323,500	2.00	255,500	100.00	5.91	2.00	4,528,940	28.00	6,860,440	466.67	42.76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2024						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Realisasi Renja Perangkat Dacrah Tahun (n-2)/2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)/2025		Tingkat Capaian Realiasai Target Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Kepegawai an																	
5.03.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administras i umum	Persen	100.00	527,749,687	99.96	283,744,200	100.00	205,265,400	94.44	104,273,900	94.44	50.80	100.00	354,203,34 0	94.44	742,221,44 0	94.44	140.64
5.03.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Paket	15.00	509,662,192	100.00	283,122,750	5.00	201,546,000	4.00	101,600,000	80.00	50.41	5.00	348,200,00 0	109.00	732,922,75 0	726.67	143.81
5.03.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3.00	12,660,750	0.00	-	1.00	2,640,000	1.00	1,784,000	100.00	67.58	1.00	4,207,500	2.00	5,991,500	66.67	47.32
5.03.01 .2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	6.00	5,426,745	24.00	621,450	12.00	1,079,400	12.00	889,900	100.00	82.44	2.00	1,795,840	38.00	3,307,190	633.33	60.94
5.03.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah an	Persen	100.00	260,596,500	0.00	-	100.00	73,318,000	100.00	66,177,899	100.00	90.26	100.00	86,865,500	100.00	153,043,39 9	100.00	58.73
5.03.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	Lapora n	3.00	134,514,000	0.00	-	12.00	33,318,000	12.00	27,177,899	100.00	81.57	12.00	44,838,000	24.00	72,015,899	800.00	53.54

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n- 2)/2024						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1)/2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	
5.03.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	6.00	126,082,500	0.00	-	1.00	40,000,000	1.00	39,000,000	100.00	97.50	2.00	42,027,500	3.00	81,027,500	50.00	64.27
5.03.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Persen	100.00	467,894,776	0.00	-	100.00	110,340,409	100.00	91,056,200	100.00	82.52	100.00	357,885,10 2	100.00	448,941,30 2	100.00	95.95
5.03.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60.00	405,241,076	0.00	-	20.00	101,450,409	20.00	82,357,200	100.00	81.18	20.00	334,038,10 2	40.00	416,395,30 2	66.67	102.75
5.03.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	40.00	62,653,700	0.00	-	20.00	8,890,000	20.00	8,699,000	100.00	97.85	20.00	23,847,000	40.00	32,546,000	100.00	51.95

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n- 2)/2024						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1)/2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Kepegawai an Sesuai SOP	Persen	100.00	5,848,714,85 5	102.58	456,657,114	100.00	2,030,896,91 1	100.00	802,545,484	100.00	39.52	100.00	2,579,476,0 30	100.00	3,838,678,6 28	100.00	65.63
5.03.02 .2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	Persen	58.00	2,784,638,80 0	49.13	64,758,110	52.00	836,661,601	54.97	285,077,656	105.71	34.07	52.00	1,357,412,2 90	54.97	1,707,248,0 56	94.78	61.31
5.03.02 .2.01.0 4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Lapora n	3.00	2,541,699,80 0	1.00	43,444,474	1.00	733,365,266	1.00	201,452,643	100.00	27.47	1.00	1,286,536,3 10	3.00	1,531,433,4 27	100.00	60.25
5.03.02 .2.01.0 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaa n Administra si Pemberhent ian	Dokum en	36.00	18,598,400	1.00	2,153,616	12.00	2,516,615	12.00	-	100.00	-	12.00	4,431,260	25.00	6,584,876	69.44	35.41
5.03.02 .2.01.1 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kepegawai an	Dokum en	36.00	224,340,600	12.00	19,160,020	12.00	100,779,720	12.00	83,625,013	100.00	82.98	12.00	66,444,720	36.00	169,229,75 3	100.00	75.43
5.03.02 .2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan yang Terisi	Persen	100.00	1,766,106,08 0	99.40	150,296,240	95.00	417,090,650	89.49	208,846,439	94.20	50.07	100.00	527,559,48 0	89.49	886,702,15 9	89.49	50.21

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n- 2)/2024						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1)/2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5.03.02 .2.02.0 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN	Dokum en	6.00	442,085,680	2.00	30,422,440	2.00	112,812,230	2.00	56,357,519	100.00	49.96	2.00	138,178,28 0	6.00	224,958,23 9	100.00	50.89
5.03.02 .2.02.0 3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Promosi ASN	Dokum en	36.00	1,324,020,40 0	12.00	119,873,800	12.00	304,278,420	12.00	152,488,920	100.00	50.11	12.00	389,381,20 0	36.00	661,743,92 0	100.00	49.98
5.03.02 .2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan Kinerja Baik	Persen	95.00	1,297,969,97 5	99.68	241,602,764	95.00	777,144,660	99.42	308,621,389	104.65	39.71	95.00	694,504,26 0	99.42	1,244,728,4 13	104.65	95.90
5.03.02 .2.04.0 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lapora n	3.00	393,800,800	2.00	76,385,800	1.00	112,083,260	1.00	117,876,571	100.00	105.17	1.00	117,914,70 0	4.00	312,177,07 1	133.33	79.27
5.03.02 .2.04.0 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaa n	Orang	30.00	254,009,925	272.00	47,570,144	10.00	125,152,200	10.00	66,248,988	100.00	52.93	50.00	81,319,620	332.00	195,138,75 2	1106.6 7	76.82
5.03.02 .2.04.0 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatka n Pembinaan kedisiplina n	Orang	130.00	650,159,250	213.00	117,646,820	95.00	539,909,200	211.00	124,495,830	222.11	23.06	150.00	495,269,94 0	574.00	737,412,59 0	441.54	113.42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2024						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)/2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				11,424,056,900		2,054,691,707		2,331,761,500		2,166,418,921				4,686,182,581		8,907,293,209		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi	Persen	90.00	11,424,056,900	73.08	2,054,691,707	75.00	2,331,761,500	87.74	2,166,418,921	116.99	92.91	80.00	4,686,182,581	87.74	8,907,293,209	97.49	77.97
5.04.02.2.02	Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	Persen	95.00	11,424,056,900	100.00	2,054,691,707	95.00	2,331,761,500	100.00	2,166,418,921	105.26	92.91	95.00	4,686,182,581	100.00	8,907,293,209	105.26	77.97
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	9.00	11,424,056,900	1.00	2,054,691,707	3.00	2,331,761,500	3.00	2,166,418,921	100.00	92.91	3.00	4,686,182,581	7.00	8,907,293,209	77.78	77.97

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Klungkung

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan hasil kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menjalankan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dalam beberapa indikator di Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BKPSDM Kabupaten Klungkung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Jabatan ASN Terisi			Persen	95	65	95	89.5	89.6	92.68	99.4	89.49	89.5	89.6	
2	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi			Persen	73	75	75	87.75	87.8	73.03	75.74	87.74	87.75	87.8	
3	Persentase ASN Berpredikat Kinerja Minimal Baik 95%			Persen	97	97	95	98	98.1	99.92	99.91	99.42	98	98.1	
4	Persentase Capaian Disiplin ASN			Persen	95.9	96	96.1	96.38	96.53	96.97	96.54	97.16	96.38	96.53	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Klungkung

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

BKPSDM Kabupaten Klungkung berfokus memberikan pelayanan kepegawaian kepada seluruh pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun layanan BKPSDM Kabupaten Klungkung yaitu, pelayanan administrasi kenaikan pangkat PNS, pelayanan sistem administrasi pensiun, pelayanan penghargaan bagi PNS yang berprestasi, memperbarui *database* kepegawaian pada SIMPEG, pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah, diklat teknis fungsional bagi PNS daerah, diklat struktural, penerimaan calon PNS, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Dalam pemberian layanan tersebut, BKPSDM telah memberikan pelayanan sesuai SOP yang berlaku dan tidak ada kendala yang signifikan selama pemberian layanan.

2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka mewujudkan yang telah dirumuskan.

A. Bidang Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian

- 1) Layanan administrasi kepegawaian belum sepenuhnya berbasis digital dan belum maksimal.

B. Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur

- 1) Pengisian jabatan ASN belum sepenuhnya menggunakan manajemen talenta.
- 2) Belum seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatannya.

C. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

- 1) Pengelolaan kinerja pegawai ASN belum tertib sesuai peraturan perundang-undangan
- 2) Belum maksimalnya pemahaman ASN terhadap peraturan disiplin, baik PNS maupun PPPK. Selain itu, internalisasi *Core Values* BerAKHLAK belum maksimal.

3. Dampak terhadap Pencapaian

Pemberian layanan kepada seluruh pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung yang optimal akan berdampak pada kinerja pegawai. Dengan memberikan pelayanan yang optimal, lingkungan kerja ASN lebih kondusif karena pelayanan mendukung kesejahteraan dan pengembangan pegawai yang memunculkan semangat kerja dan loyalitas terhadap instansi. Kemudahan dalam mengakses layanan juga akan mendukung pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sehingga mereka merasa terbantu dan dapat bekerja dengan lebih efisien.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan pendekatan teknik analisis dengan mempertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya di kelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal.

- Faktor Internal

a. Kekuatan

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan mencapai tujuan. Adapun faktor internal (kekuatan) yang ditemui adalah:

1. Tersedianya sarana kerja
2. Tersedianya anggaran / dana dan
3. Adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas

b. Kelemahan

Merupakan ketidakmampuan internal dan organisasi sehingga gagal mencapai sasaran. Adanya faktor internal (kelemahan) yang ada adalah:

1. Adanya penempatan SDM yang belum sesuai kebutuhan
2. Masih kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dibidangnya

- Faktor Eksternal

Faktor eksternal menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, baik ditinjau dari segi ekonomi, teknologi sosial budaya, ekologi dan keamanan. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelayanan OPD yakni perubahan regulasi atau peraturan kepegawaian yang dinamis yang dapat mempengaruhi mekanisme kerja dan pelayanan. Kebijakan daerah yang berubah – ubah dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.

5. Isu – isu Penting Berupa Rekomendasi atau Catatan yang Strategis

Berikut isu – isu penting BKPSDM Kabupaten Klungkung

- a. Belum Optimalnya Pengembangan Digitalisasi Layanan Kepegawaian
- b. Belum Optimalnya Penerapan Manajemen Talenta
- c. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi
- d. Belum Optimalnya Kinerja ASN
- e. Belum Optimalnya Disiplin ASN

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah diinput pada aplikasi SIPD, di dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2026, memang terdapat beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD yang tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Perbedaan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan disebabkan adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai peraturan perundangan-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara spesifik, terdapat perubahan anggaran yang signifikan pada program/kegiatan/subkegiatan dalam Renja 2026. Perubahan tersebut terjadi pada subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan penambahan anggaran untuk SPPD sidak ke Nusa Penida, selain itu terjadi perubahan pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan penambahan anggaran untuk asesmen.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tahun 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tidak terdapat perbedaan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. BKPSDM Kabupaten Klungkung memiliki 3 program, 10 kegiatan dan 21 subkegiatan.

Indikator dan target dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan BKPSDM Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
BKPSDM Kabupaten Klungkung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				12.282.323.982,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				13.466.970.382,00	
I	KEPEGAWAIAN				8.418.507.121,00	KEPEGAWAIAN				8.848.709.082,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91,35 Indeks	7.196.234.771,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91,35 Indeks	7.672.053.352,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,32 Persen	2.313.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,32 Persen	2.204.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.391.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.339.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 laporan	922.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 laporan	865.000,00	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	100 persen	6.973.932.711,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	100 persen	7.414.687.252,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	6.972.567.311,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	7.413.778.752,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	1.365.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	908.500,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81,80 indeks	3.382.700,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81,80 indeks	3.229.800,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	3.382.700,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	3.229.800,00	
4	Administrasi Umum Perangkat daerah		Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	75,55 point	7.475.840,00	Administrasi Umum Perangkat daerah		Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	75,55 point	42.096.900,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	39.861.300,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	760.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	737.800,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.715.840,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.497.800,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	86.910.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	80.910.500,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	44.838.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	38.838.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	42.072.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	42.072.500,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen	122.219.320,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen	128.924.100,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	19 unit	115.519.320,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	19 unit	116.224.100,00	

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 unit	6.700.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 unit	12.700.000,00	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		PERSENTASE LAYANAN KEPEGAWAIAN SESUAI SOP	100 persen	1.222.272.350,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		PERSENTASE LAYANAN KEPEGAWAIAN SESUAI SOP	100 persen	1.176.655.730,00	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1) Persentase Pemenuhan ASN Sesuai Kualifikasi 2) Persentase Pengembangan Digitalisasi Layanan Kepegawaian	1) 100 persen 2) 78,57 persen	366.811.590,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1) Persentase Pemenuhan ASN Sesuai Kualifikasi 2) Persentase Pengembangan Digitalisasi Layanan Kepegawaian	1) 100 persen 2) 78,57 persen	284.178.190,00	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 laporan	322.813.410,00	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 laporan	253.311.990,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 dokumen	399.480,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 dokumen	385.600,00	

	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	43.598.700,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	30.480.600,00	
2	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Jabatan ASN Terisi	89,60 persen	313.612.100,00	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Jabatan ASN Terisi	89,60 persen	313.629.500,00	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	109.575.700,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	109.593.100,00	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	12 dokumen	204.036.400,00	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	12 dokumen	204.036.400,00	
3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1) Persentase ASN Berpredikat Kinerja Minimal Baik 95% 2) Persentase Capaian Disiplin ASN	1) 98,10 persen 2) 96,53 persen	541.848.660,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1) Persentase ASN Berpredikat Kinerja Minimal Baik 95% 2) Persentase Capaian Disiplin ASN	1) 98,10 persen 2) 96,53 persen	578.848.040,00	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	59.112.700,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	59.112.700,00	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi		Jumlah ASN yang diberikan	100 orang	76.553.020,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi		Jumlah ASN yang diberikan	100 orang	76.552.400,00	

	Pegawai		Penghargaan			Pegawai		Penghargaan			
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160 orang	406.182.940,00	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160 orang	443.182.940,00	Penambahan anggaran untuk SPPD sidak ke Nusa Penida
II	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.863.816.861,00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.618.261.300,00	
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	87,80 persen	3.863.816.861,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	87,80 persen	4.618.261.300,00	Penambahan anggaran untuk asesmen ASN
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	95 persen	3.863.816.861,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	95 persen	4.618.261.300,00	
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 laporan	3.863.816.861,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 laporan	4.618.261.300,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan usulan dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan ditampung dalam wadah musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan sampai musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja perangkat daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum perangkat daerah yang berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil musrenbang tersebut, para pemangku kepentingan mengusulkan 2 usulan yang berkaitan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tupoksi BKPSDM yaitu berkaitan dengan belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi dan belum Optimalnya Disiplin ASN sehingga usulan yang diberikan yaitu Pembinaan Disiplin dan Asesmen PNS.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Klungkung

No	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak dialokasikan anggaran untuk perjalanan dinas biasa	Pembinaan Disiplin	BKPSDM	Rp110.000.000	
2	Jumlah PNS yang belum mengikuti asesmen	Asesmen PNS	BKPSDM	Rp2.239.200.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu, PP No. 17 Tahun 2017 juga mengamanatkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang mengoptimalkan alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas.

RKP Tahun 2026 memiliki tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan prioritas dan mencapai sasaran tersebut, RKP 2026 menetapkan 8 prioritas pembangunan nasional, yang terdiri dari:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional berkisar 5,8 – 6,3 persen;
2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 37,14 persen;
3. *Gross National Income (GNI)* per kapita 5.870 per dolar AS;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67;
5. Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0,0 - 0,5 persen;
6. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,5 persen;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44 – 4,96 persen;
8. Proyeksi Rasio Gini sebesar 0,377 – 0,380 indeks; dan
9. Indeks Modal Manusia ditargetkan sebesar 0,57 indeks.

Terhadap arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, BKPSDM Kabupaten Klungkung, memiliki peranan strategis sesuai fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, sehingga arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan, serta sasaran dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung. Secara spesifik, BKPSDM Kabupaten Klungkung mendukung prioritas pembangunan ke-7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2026, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2026 terdiri dari:

1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal;
2. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
3. Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata;
4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi;
5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi;
6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali;
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;

Dari tujuh prioritas pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026, BKPSDM Kabupaten Klungkung mendukung prioritas pembangunan ke-7 yaitu tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

3.3. Telaahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2026 terdiri dari:

1. Pendidikan, Kesehatan, dan SDM;
2. Kemiskinan;
3. Tata Kelola Pemerintahan;
4. Kelestarian Lingkungan;
5. Pariwisata dan Budaya.

BKPSDM Kabupaten Klungkung secara khusus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung ke-3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan.

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.4.1. Tujuan

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2025 - 2029 adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan”.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya ASN yang Profesional”.

Ada 4 (empat) dimensi yang dipakai untuk menentukan profesionalitas ASN ini yaitu:

- 1) Kualifikasi dapat didekati dengan data pendidikan formal yang ada dalam aplikasi SIMPEG;
- 2) Kompetensi dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun administratif serta pengalaman kerja;
- 3) Kinerja didekati dengan data kinerja dalam SKP;
- 4) Disiplin didekati dengan jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Klungkung
Tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Klungkung
Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal renstra	Target Kinerja Tujuan Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	88,09	89,7	91,4	93	94,5	95,8
2		Terwujudnya ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Klungkung beserta target di
Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target Th 2026	Penjelasan
1	Indeks Profesionalitas ASN	80,25	1. Kualifikasi dapat dilihat dari Pendidikan formal PNS 2. Kompetensi dapat dilihat dari diklat yang pernah diikuti 3. Kinerja dapat dilihat dari perjanjian kinerja dan SKP 4. Disiplin dapat dilihat pelanggaran disiplin PNS

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor – faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan target kinerja tujuan, sasaran dan penerapan strategi dan arah kebijakan BKPSDM Tahun 2026 dirumuskan program kegiatan dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya BKPSDM mendukung pencapaian tujuan yang hendak dicapai, maka BKPSDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung Visi Bupati Klungkung yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Menuju Klungkung Mahotama (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur) dengan mendukung misi, terutama Misi Ke-20 yaitu Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. Visi dan misi Bupati tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung dalam merumuskan program dan kegiatan.

4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berpedoman pada Renstra BKPSDM 2025 – 2029 dan RKPD Tahun 2026 maka dirancang 3 program 10 Kegiatan dan 21 subkegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp13.466.970.382,00.

Fokus masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan memiliki fokus kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Kepegawaian Daerah memiliki fokus kegiatan yaitu Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fokus kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, khususnya di bagian pagu indikatif yang disebabkan oleh adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai peraturan perundangan-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara spesifik, terdapat perubahan pagu indikatif yang signifikan pada program/kegiatan/subkegiatan dalam Renja 2026. Perubahan tersebut terjadi pada subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan penambahan anggaran untuk SPPD sidak ke Nusa Penida, selain itu terjadi perubahan pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan penambahan anggaran untuk asesmen.

4.3. Tabel Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Klungkung

Tabel 4.1 (T.C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Klungkung Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				13.466.970.382,00				13.909.219.407,00
5.03	KEPEGAWAIAN				8.848.709.082,00				10.155.180.907,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,35 Indeks	7.672.053.352,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		91,36 Indeks	7.969.543.427,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65,32 Persen	2.204.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	65,33 Persen	7.888.300,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.339.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8 Dokumen	5.788.300,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan,	29 Laporan	865.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	29 Laporan	2.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa			UMUM			
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100 Persen	7.414.687.252,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	100 Persen	7.427.744.152,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang/bulan	7.413.778.752,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK DAERAH	-	40 Orang/bulan	7.413.778.752,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	908.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	13 Laporan	13.965.400,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,80 indeks	3.229.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		81,81 indeks	16.235.475,00
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	3.229.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 dokumen	16.235.475,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75,55 point	42.096.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	75,56 point	287.817.500,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	39.861.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8 Paket	281.500.000,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	737.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	1.900.000,00
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.497.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	4.417.500,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	80.910.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	100 persen	87.118.000,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua	12 laporan	38.838.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 laporan	44.118.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa						
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	42.072.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	43.000.000,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	128.924.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	100 persen	142.740.000,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 unit	116.224.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	19 Unit	130.740.000,00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 unit	12.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	18 Unit	12.000.000,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Kepegawaian sesuai SOP	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1.176.655.730,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 persen	2.185.637.480,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1) Persentase Pemenuhan ASN Sesuai Kualifikasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan,	1) 100 persen	284.178.190,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		1) 100 persen	1.214.929.410,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) Persentase Pengembangan Digitalisasi Layanan Kepegawaian	Semua Kel/Desa	2) 78,57 persen		SEBELUMNYA		2) 85,71 persen	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	253.311.990,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 laporan	1.112.704.710,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	385.600,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 dokumen	7.000.000,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30.480.600,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Dokumen	95.224.700,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan ASN Terisi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89,60 persen	313.629.500,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	89,70 persen	347.972.620,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Klungkung,	6 dokumen	109.593.100,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	6 dokumen	123.532.920,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	204.036.400,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 dokumen	224.439.700,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1) Persentase ASN Berpredikat Kinerja Minimal Baik 95% 2) Persentase Capaian Disiplin ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1) 98,10 persen 2) 96,53 persen	578.848.040,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) 98,30 persen 2) 96,68 persen	622.735.450,00
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	59.112.700,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 laporan	84.984.700,00
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 orang	76.552.400,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		106 orang	91.752.300,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 orang	443.182.940,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		170 orang	445.998.450,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,80 persen	4.618.261.300,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		87,85 persen	3.754.038.500,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	4.618.261.300,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		95 persen	3.754.038.500,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	4.618.261.300,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 laporan	3.754.038.500,00
JUMLAH					13.466.970.382,00				13.909.219.407,00

4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD, yang terkait tugas, fungsi, dan mandatnya. Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formula	Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Terwujudnya ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai IP ASN Kabupaten Klungkung adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai ASN di Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas jabatan	Sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui: 1. Dimensi Kualifikasi = 25% 2. Dimensi Kompetensi = 40% 3. Dimensi Kinerja = 30% 4. Dimensi Disiplin = 5%	Target	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,00	1. Bidang Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian 2. Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur 3. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

BAB V

PENUTUP

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung yang berisi prioritas program dan kegiatan, dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya rencana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Demikian Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung selama kurun waktu 2026, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


BUPATI KLUNGKUNG
IMADE SATRIA